PEREMPUAN, KEPEMIMPINAN, DAN NEGOSIASI KEKUASAAN DALAM POLITIK KONTEMPORER

Sisiana Tuamaji

Universitas Nasional, Indonesia
E-mail : salawalisisiana@gmail.com

ABSTRAK

Kepemimpinan perempuan dalam politik kontemporer masih menghadapi persoalan kompleks yang berkaitan dengan ketimpangan representasi, dominasi struktur patriarkal, dan distribusi kekuasaan dalam institusi politik. Meskipun kebijakan afirmasi telah membuka peluang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, peningkatan keterwakilan secara kuantitatif belum sepenuhnya menjamin keterlibatan substantif dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kepemimpinan perempuan, representasi politik, dan negosiasi kekuasaan, dengan menitikberatkan pada hambatan struktural dan kultural, pembentukan agensi politik, serta pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan metode *integrative literature review*. Data diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional serta buku akademik yang relevan, kemudian dianalisis melalui identifikasi tema, perbandingan temuan, dan sintesis kritis. Hasil kajian menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap kekuasaan masih dipengaruhi oleh budaya patriarkal, ketimpangan sumber daya, pola patronase, serta dominasi jaringan elite politik. Namun, perempuan juga menunjukkan kapasitas agensi melalui penguatan jaringan sosial, dukungan organisasi, pembentukan aliansi, dan negosiasi kepentingan. Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan kepemimpinan perempuan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah keterwakilan dalam institusi politik, tetapi perlu dinilai melalui kemampuan memengaruhi agenda, membangun posisi tawar, memperoleh akses terhadap jabatan strategis, dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menawarkan perspektif integratif bahwa transformasi kepemimpinan perempuan membutuhkan perluasan akses politik sekaligus perubahan struktural dan kelembagaan menuju distribusi kekuasaan yang lebih setara.

Kata Kunci : *Agensi Politik; Kepemimpinan Perempuan; Negosiasi Kekuasaan; Representasi Politik; Struktur Patriarkal.*

PENDAHULUAN

Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan bagian penting dari perkembangan demokrasi. Kesempatan untuk memilih dan dipilih, menduduki jabatan publik, serta terlibat dalam pengambilan keputusan merupakan bentuk pengakuan terhadap hak politik perempuan. Namun, keterlibatan tersebut tidak selalu menunjukkan bahwa perempuan telah memperoleh posisi yang setara dalam struktur kekuasaan.

Di Indonesia, kebijakan afirmasi melalui kuota pencalonan perempuan paling sedikit 30 persen menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses perempuan terhadap lembaga legislatif. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengatasi ketimpangan keterwakilan yang selama ini berlangsung dalam sistem politik. Meskipun demikian, peningkatan jumlah perempuan dalam pencalonan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan yang sebanding dalam distribusi kekuasaan.

Aspinall, White, dan Savirani (2021) menunjukkan bahwa kandidat perempuan di Indonesia menghadapi hambatan berupa sikap patriarkal dan ketimpangan struktural. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa perempuan menggunakan strategi yang berbeda untuk memenangkan kompetisi politik, antara lain dengan memobilisasi jaringan perempuan dan memanfaatkan modal politik keluarga. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan perempuan dalam politik tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individual, tetapi juga oleh sumber daya dan jaringan yang dapat mereka akses.

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika keterwakilan perempuan berhadapan dengan praktik dinasti politik. Wardani dan Subekti (2021) menemukan bahwa sekitar 44 persen perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR pada Pemilu 2019 berasal dari keluarga dinasti politik. Temuan ini menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya ekonomi dan jaringan kekuasaan keluarga dapat memberikan keuntungan elektoral bagi sebagian kandidat perempuan. Pada saat yang sama, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesetaraan kesempatan bagi perempuan yang tidak memiliki latar belakang keluarga politik.

Keterwakilan perempuan juga perlu dilihat dari hubungan antara keberadaan dalam lembaga politik dan kemampuan memengaruhi keputusan. Soetjipto (2023), dalam kajiannya mengenai perempuan muda dan partai politik, menunjukkan bahwa partisipasi deskriptif perlu diarahkan menuju representasi substantif. Artinya, keberadaan perempuan dalam organisasi politik harus disertai kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memperjuangkan kepentingan yang lebih luas.

Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan sistem pemilu, tetapi juga dengan karakter dan budaya organisasi politik. Ekawati et al. (2024) menunjukkan bahwa proses feminisasi partai politik di Indonesia masih berlangsung secara terbatas. Peningkatan representasi perempuan dalam struktur partai belum selalu diikuti respons yang memadai terhadap kebijakan yang berpihak pada perempuan. Hal ini memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi tidak otomatis mengubah orientasi dan praktik kelembagaan.

Di sisi lain, perempuan tidak dapat terus-menerus diposisikan sebagai pihak yang pasif dalam menghadapi struktur politik. Dewi et al. (2023), melalui penelitian mengenai kandidat legislatif perempuan di Sumatera Barat, menunjukkan pentingnya organisasi perempuan dalam menyediakan pelatihan politik, konsultasi, dukungan moral, dan jaringan sosial. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa agensi perempuan dapat tumbuh melalui hubungan kolektif dan dukungan organisasi.

Dengan demikian, kepemimpinan perempuan perlu dibaca melalui hubungan antara representasi, struktur kekuasaan, dan agensi. Perempuan bukan hanya berupaya memasuki ruang politik, tetapi juga melakukan berbagai strategi untuk memperoleh legitimasi, membangun posisi tawar, dan memengaruhi keputusan. Negosiasi kekuasaan menjadi penting karena proses memperoleh pengaruh politik berlangsung di tengah relasi sosial dan kelembagaan yang tidak selalu setara.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara kepemimpinan perempuan, representasi politik, dan negosiasi kekuasaan dalam politik kontemporer. Kajian ini secara khusus diarahkan untuk memahami bagaimana hambatan struktural dan kultural membentuk peluang kepemimpinan perempuan, bagaimana perempuan membangun agensi politik, serta sejauh mana keterwakilan perempuan menghasilkan pengaruh substantif dalam pengambilan keputusan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) dan metode *integrative literature review*. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan mengintegrasikan berbagai hasil penelitian serta perspektif teoretis mengenai kepemimpinan perempuan, representasi politik, agensi, dan negosiasi kekuasaan.

Sumber data penelitian berasal dari artikel jurnal nasional dan internasional serta buku akademik yang relevan dengan fokus kajian. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah dengan menggunakan kata kunci seperti *women's political leadership*, *women's political representation*, *gender and political power*, *women's political agency*, dan substantive *representation*.

Literatur dianalisis berdasarkan kesesuaian tema, relevansi substansi, kredibilitas publikasi, serta kontribusinya terhadap pembahasan kepemimpinan perempuan. Analisis dilakukan melalui identifikasi gagasan utama, pengelompokan tema, perbandingan temuan penelitian, dan sintesis kritis. Hasil analisis kemudian digunakan untuk membangun pemahaman mengenai hubungan antara keterwakilan perempuan dan distribusi kekuasaan dalam politik kontemporer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Representasi Perempuan dan Akses terhadap Kekuasaan

Representasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam menilai kualitas demokrasi. Namun, representasi tidak cukup dipahami sebagai keberadaan perempuan dalam lembaga politik. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah keberadaan tersebut memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memengaruhi keputusan dan memperjuangkan kepentingan yang diwakilinya.

Pitkin (1967) membedakan representasi politik berdasarkan beberapa dimensi, termasuk representasi formal dan substantif. Pembedaan ini membantu menjelaskan bahwa kehadiran perempuan dalam institusi politik belum tentu menunjukkan bahwa kepentingan perempuan telah terakomodasi dalam proses kebijakan.

Aspinall et al. (2021) memperlihatkan bahwa akses perempuan terhadap kekuasaan di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi struktural, sikap patriarkal, dan kepemilikan jaringan politik.

Sementara itu, Wardani dan Subekti (2021) menunjukkan bahwa hubungan keluarga dengan elite politik dapat menjadi modal penting bagi kandidat perempuan dalam kompetisi elektoral.

Kedua temuan tersebut memperlihatkan bahwa kesempatan perempuan untuk memperoleh kekuasaan tidak berlangsung dalam kondisi yang seragam. Sebagian perempuan memperoleh akses melalui jaringan keluarga dan sumber daya elite, sedangkan sebagian lainnya membangun dukungan melalui jaringan sosial dan organisasi perempuan.

Dengan demikian, peningkatan keterwakilan perempuan perlu disertai evaluasi terhadap mekanisme yang menentukan siapa yang memperoleh kesempatan untuk masuk dan bertahan dalam struktur politik.

Hambatan Struktural dan Budaya Politik

Kepemimpinan perempuan tidak berlangsung dalam ruang yang bebas dari ketimpangan gender. Struktur partai, budaya organisasi, pola patronase, serta distribusi sumber daya dapat membentuk batas-batas partisipasi perempuan.

Penelitian Soetjipto (2023) menunjukkan bahwa perempuan muda menghadapi tantangan dalam lingkungan politik yang didominasi budaya maskulin, struktur patriarkal, serta diskriminasi berbasis gender dan usia. Hambatan tersebut dapat membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh pengalaman politik dan mengembangkan kapasitas kepemimpinan.

Ekawati et al. (2024) juga memperlihatkan bahwa respons partai politik terhadap representasi perempuan belum sepenuhnya menghasilkan transformasi kelembagaan. Peningkatan jumlah perempuan dalam struktur partai tidak selalu diikuti dukungan terhadap kebijakan yang responsif gender.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi perlu dilihat secara lebih kritis. Kuota dapat membuka pintu masuk bagi perempuan, tetapi perubahan yang lebih mendasar membutuhkan pembenahan mekanisme internal partai, pola rekrutmen, proses kaderisasi, dan distribusi kewenangan.

Temuan Niner et al. (2024) mengenai kepemimpinan perempuan di Timor-Leste juga memperlihatkan bahwa stereotip gender, beban domestik, dan ketimpangan sumber daya masih membatasi penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan. Meskipun konteks politiknya berbeda dengan Indonesia, temuan tersebut memberikan perspektif pembanding mengenai bagaimana budaya gender dapat memengaruhi legitimasi seorang pemimpin perempuan.

Agensi Perempuan dan Strategi Negosiasi Kekuasaan

Pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan tidak cukup berhenti pada identifikasi hambatan. Perempuan juga perlu dipahami sebagai aktor yang memiliki kemampuan membangun strategi dan memengaruhi struktur kekuasaan.

Dewi et al. (2023) menunjukkan bahwa organisasi perempuan memiliki peran penting dalam mempersiapkan kandidat legislatif melalui pelatihan, konsultasi, dukungan moral, dan jaringan sosial. Dukungan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan perempuan tidak selalu bertumpu pada modal individual, tetapi juga dapat dibangun melalui kekuatan kolektif.

Bayo (2021) melalui kajian mengenai perempuan di Indonesia Timur memperlihatkan pentingnya kegigihan, jaringan, dan dukungan organisasi dalam perjalanan perempuan menuju posisi politik. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kepemimpinan perempuan merupakan proses yang melibatkan kapasitas individu sekaligus kondisi sosial yang memungkinkan mereka bertahan dalam arena politik.

Ette dan Akpan-Obong (2022) juga memperlihatkan bagaimana perempuan di Nigeria menegosiasikan hambatan politik melalui berbagai strategi dalam struktur masyarakat yang

maskulin. Kajian tersebut memberikan perbandingan bahwa perempuan tidak selalu menghadapi ketimpangan dengan cara yang sama, tetapi mengembangkan strategi sesuai dengan kondisi sosial dan kelembagaan yang dihadapi.

Negosiasi kekuasaan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai proses membangun posisi melalui aliansi, penguatan jaringan, kompromi, dan penciptaan legitimasi. Negosiasi tidak selalu berarti menerima struktur yang ada, melainkan dapat menjadi cara untuk memperoleh ruang pengaruh dan memperluas kapasitas politik.

Dengan demikian, agensi perempuan perlu dilihat sebagai kemampuan untuk bertindak di dalam struktur yang membatasi sekaligus membuka peluang perubahan. Perempuan bukan sekadar penerima kebijakan atau objek afirmasi, melainkan aktor yang terlibat dalam pembentukan relasi kekuasaan.

Keterwakilan dan Pengaruh Substantif dalam Pengambilan Keputusan

Persoalan penting berikutnya adalah bagaimana mengukur keberhasilan kepemimpinan perempuan. Jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik memang menjadi indikator penting, tetapi belum cukup untuk menjelaskan kualitas pengaruh mereka.

Rashkova dan Erzeel (2023) mengembangkan pendekatan pengukuran representasi substantif perempuan melalui sejumlah indikator yang memungkinkan perbandingan lintas negara. Perspektif ini memperkuat pentingnya membedakan keberadaan perempuan dalam lembaga politik dengan tindakan dan pengaruh yang mereka hasilkan.

Dalam konteks Indonesia, penelitian mengenai lembaga penyelenggara pemilu oleh Halimatusa'diyah dan Jannah (2025) menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga pengelola pemilu masih dipengaruhi oleh ketidakjelasan regulasi dan aspek informal kelembagaan. Kajian ini memperluas pemahaman bahwa persoalan representasi tidak hanya terjadi pada lembaga legislatif, tetapi juga pada institusi yang mengelola proses demokrasi.

Sementara itu, Birnir et al. (2025) dalam kajian Pemilu Legislatif Indonesia 2024 menunjukkan bahwa posisi kandidat dalam daftar partai dan sikap partai dapat memengaruhi peluang keterpilihan perempuan. Temuan tersebut menegaskan pentingnya peran institusi politik dalam membentuk hasil representasi.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, pengaruh substantif perempuan dapat dianalisis melalui beberapa dimensi, yaitu keterlibatan dalam penentuan agenda, akses terhadap posisi strategis, kemampuan membangun koalisi, pengaruh terhadap keputusan, serta kontribusi terhadap kebijakan yang responsif gender.

Dengan demikian, evaluasi kepemimpinan perempuan perlu bergerak dari pertanyaan mengenai berapa banyak perempuan yang menduduki jabatan politik menuju pertanyaan mengenai seberapa besar pengaruh yang dapat mereka gunakan dalam proses pengambilan keputusan.

KESIMPULAN

Kepemimpinan perempuan dalam politik kontemporer merupakan persoalan yang berkaitan erat dengan representasi, struktur kekuasaan, dan agensi politik. Peningkatan keterwakilan melalui kebijakan afirmasi menjadi langkah penting dalam memperluas akses perempuan terhadap institusi politik. Namun, keterwakilan formal belum cukup untuk menjamin adanya pengaruh yang setara dalam proses pengambilan keputusan.

Hambatan struktural, budaya politik yang maskulin, ketimpangan sumber daya, serta dominasi jaringan elite masih memengaruhi peluang perempuan dalam memperoleh dan

mempertahankan posisi strategis. Di tengah kondisi tersebut, perempuan mengembangkan berbagai strategi melalui penguatan jaringan, pembentukan aliansi, dukungan organisasi, dan negosiasi kepentingan.

Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan kepemimpinan perempuan tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik. Ukuran yang lebih substantif adalah kemampuan perempuan memperoleh legitimasi, membangun posisi tawar, memengaruhi agenda, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, upaya memperkuat kepemimpinan perempuan perlu diarahkan tidak hanya pada perluasan akses, tetapi juga pada perubahan distribusi kekuasaan dan praktik kelembagaan yang lebih setara.

DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's political representation in Indonesia: Who wins and how? *Journal of Current Southeast Asian Affairs, 40*(1), 3–27. https://doi.org/10.1177/1868103421989720

Bayo, L. N. (2021). Women who persist: Pathways to power in Eastern Indonesia. *Journal of Current* Southeast *Asian Affairs, 40*(1), 93–115. https://doi.org/10.1177/1868103421989712

Birnir, J. K., Okthariza, N., Agustyati, K. N., & Pratama, H. M. (2025). The patriarchy in the parties: Voters, parties and women's electoral fortunes in the 2024 legislative election in Indonesia. *Electoral Studies, 95,* 102938.

Dewi, K. H., Latifa, A., Subono, N. I., Prasetyawan, W., & Prasojo, A. P. S. (2023). "Dia Dikader": Women's NGOs roles, networks, and the agency of women's legislative candidates in West Sumatra. *Asian Journal of Women's Studies, 29*(4), 506–530. https://doi.org/10.1080/12259276.2023.2285395

Ekawati, E., Wardani, S. B. E., Romli, L., & Subono, N. I. (2024). The feminisation of Indonesia's political parties: Toward feminised parties? *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 28*(1), 94–107. https://doi.org/10.22146/jsp.82663

Ette, M., & Akpan-Obong, P. (2022). Negotiating access and privilege: Politics of female participation and representation in Nigeria. *Journal of Asian and African Studies, 58*(7). https://doi.org/10.1177/00219096221084253

Halimatusa'diyah, I., & Jannah, A. N. (2025). Understanding hidden layers in political participation: Women's representation in Indonesia's election management bodies. *Women's Studies International Forum, 112,* 103141. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103141

Niner, S., Nguyen Thi Phuong Tam, T., Morrison, E., & Iman, M. E. (2024). Feto bele: Contemporary perceptions and expectations of women's political leadership in Timor-Leste. *International Feminist Journal of Politics, 26*(1), 100–127. https://doi.org/10.1080/14616742.2023.2203187

Oktaviani, F. H. (2024). Indonesian women leaders navigating hegemonic femininity: A Gramscian lens. *Gender, Work & Organization, 31*(2), 472–493. https://doi.org/10.1111/gwao.13084

Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.

Rashkova, E. R., & Erzeel, S. (2023). Measuring the substantive representation of women cross-nationally: Towards a composite index. *Political Studies Review, 21*(3), 523–531. https://doi.org/10.1177/14789299221148430

Soetjipto, A. W. (2023). Perempuan muda dan partai politik: Dari descriptive participation menuju substantive representation. *Jurnal Perempuan, 28*(2), 87–100. https://doi.org/10.34309/jp.v28i2.844

Wardani, S. B. E., & Subekti, V. S. (2021). Political dynasties and women candidates in Indonesia's 2019 election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs, 40*(1), 28–49. https://doi.org/10.1177/1868103421991144